



Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan 2021

Albert Honggara^{1*}, Jamaluddin²

^{1,2}Universitas Mulawarman, Jl. Kuaro, Gn.Kelua, Samarinda, Indonesia

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of regional financial performance on community welfare in districts/cities in Central Kalimantan Province. Regional financial performance is measured by the regional financial independence ratio and the effectiveness ratio of Regional Original Income, while community welfare is measured by the Human Development Index (HDI). This research was conducted in 14 districts/cities in Central Kalimantan Province. The research method used in this research is multiple linear regression. The analytical tool used is the Statistical Program for Social Science. The type of data used in this research is secondary data. The data used in this research is the realization of regional income and expenditure budgets from 2020-2021. Realization of regional income and expenditure budgets is obtained through the website of the Directorate General of Regional Financial Balance. HDI data is obtained through the Central Statistics Agency website. The results of this research show that the regional financial independence ratio has a partial effect on community welfare, while the regional original income effectiveness ratio has no partial effect on community welfare in all regencies/cities in Central Kalimantan Province.

Type of Paper: Empirical

Keywords: Regional financial performance; regional financial independence ratio; effectiveness ratio of regional original income; community welfare

1. Pengantar

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan undang-undang di atas, kepala daerah memiliki kewajiban untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat karena kepala daerah merupakan penyelenggara pemerintah daerah.

¹ * Kontak Penulis:

E-mail: alberthoz100@gmail.com¹, jamaluddin@feb.unmul.ac.id²
Afiliasi: Universitas Mulawarman

Indeks Pembangunan Manusia bisa menjadi indikator dari kesejahteraan masyarakat (Evlyn & Rahayu, 2018).

IPM dapat menjelaskan cara masyarakat untuk memperoleh banyak hal seperti pendapatan, kesehatan, dan pendidikan dengan mengandalkan hasil Pembangunan (Badan Pusat Statistik, 2022). Berdasarkan hal tersebut IPM dapat digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat karena kebutuhan masyarakat dapat tercapai dengan mengandalkan hasil pembangunan. Menurut Dura (2016) kebutuhan yang dipenuhi agar masyarakat sejahtera adalah kelayakan rumah, biaya pendidikan yang murah, dan kualitas kesehatan.

IPM dibentuk berdasarkan tiga hal yaitu umur panjang (diukur dengan umur harapan hidup), pengetahuan (diukur dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan standar hidup layak (diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto). Pendapatan Nasional Bruto (PNB) menggambarkan pendapatan masyarakat. Pada tingkat yang lebih kecil PNB digantikan dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran riil per kapita juga mampu menggambarkan pendapatan masyarakat dan tingkat kesejahteraan (Badan Pusat Statistik, 2022).

Kinerja keuangan yang bagus diperlukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kinerja yang bagus menandakan bahwa daerah mampu untuk mendukung pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kunci kesejahteraan masyarakat (Zakni, 2020).

Rasio kemandirian keuangan daerah memberikan gambaran seberapa mandiri daerah dengan keuangannya sendiri. Jika rasio ini tinggi maka daerah mampu menggali PAD dengan baik (Mahmudi, 2016). Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah dapat lebih mendukung pelayanan publik dengan dana yang lebih banyak sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat

Rasio efektivitas PAD memberikan gambaran semampu apa daerah dapat mencapai target anggaran PAD (Mahmudi, 2016). Pemerintah daerah membuat program untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Program-program ini tercermin dalam APBD (Mardiasmo, 2021). Semakin tinggi efektivitas PAD maka semakin banyak dana yang bisa dipakai oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Target IPM

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia		Target Indeks Pembangunan Manusia	
		2020	2021	2020	2021
1.	Palangkaraya	80.77	80.82	79.90	80.00
2.	Kotawaringin Timur	71.31	71.38	69.76	69.94
3.	Kotawaringin Barat	72.87	73.07	72.93	73.38
4.	Barito Timur	71.39	71.47	72.07	72.53
5.	Barito Utara	70.59	70.79	71.02	71.65
6.	Barito Selatan	70.22	70.54	71.33	72.22
7.	Seruyan	67.58	67.67	68.50	69.30
8.	Sukamara	68.03	68.27	68.03	68.62
9.	Pulang Pisau	68.45	68.53	68.71	69.14*
10.	Katingan	68.68	68.89	69.14	69.67
11.	Kapuas	69.48	69.63	71.72	73.26
12.	Gunung Mas	70.81	71.03	71.82	72.46
13.	Lamandau	70.51	70.58	70.77	71.20
14.	Murung Raya	67.98	68.12	68.58	69.05

Sumber : BPS, RPJMD, RKPD

Keterangan : (*) Taksiran

Setiap pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah membuat rencana pembangunan untuk mencapai tujuannya. Salah satu tujuan yang terdapat dalam rencana pembangunan tersebut adalah meningkatkan IPM sesuai dengan yang telah ditargetkan. Tabel di atas menunjukkan masih ada beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak mencapai target IPM. Selain itu, pencapaian IPM di daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak merata. Hal ini dapat dilihat dari status IPM masing-masing daerah. Status IPM Palangkaraya satu-satunya yang berstatus sangat tinggi, 7 daerah berstatus tinggi, dan 6 daerah berstatus sedang.

Berdasarkan data dari BPS, peringkat pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan dari peringkat 20 menjadi peringkat 21. Hal ini menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi peringkat ketiga dari lima provinsi di Pulau Kalimantan. Selama tahun 2020 – 2021, Kota Palangkaraya mencapai IPM tertinggi di wilayah Pulau Kalimantan (Kalteng.co, 2022). Justru peringkat pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah menurun. Hal ini disebabkan karena pencapaian IPM di daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak merata. Hal ini dapat dilihat dari status IPM masing-masing daerah. Status IPM Palangkaraya satu-satunya yang berstatus sangat tinggi, 7 daerah berstatus tinggi, dan 6 daerah berstatus sedang.

Studi Cahyaning & Putri (2022) menunjukkan rasio efektivitas PAD mempunyai pengaruh positif terhadap IPM. Selain itu penelitian oleh Karimah et al., (2020) menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap IPM. Namun penelitian Astuti & Mispriyanti (2019) menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap IPM yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. Perbedaan hasil penelitian di atas membuat peneliti untuk mengkaji kembali pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Peneliti melakukan penelitian pada Provinsi Kalimantan Tengah karena hanya provinsi ini yang mengalami penurunan peringkat IPM di Pulau Kalimantan.

2. Literature Review

2.1 Teori Keagenan

Teori ini menjelaskan hubungan yang timbul karena suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak. Hubungan tersebut adalah individu atau lebih (principal) mempekerjakan pihak lain (agent). Hubungan tersebut terjadi melalui pendelegasian wewenang (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan dapat diterapkan di sektor publik. Principal dalam sektor publik adalah masyarakat sedangkan agent adalah pemerintah (Bergman & Lane, 1990). Teori keagenan ini menganggap bahwa apa yang dilakukan pemerintah sebagai agen tidak boleh bertentangan dengan keinginan atau kepentingan masyarakat sebagai prinsipal (Jensen & Meckling, 1976).

Teori keagenan digunakan dalam penelitian ini karena adanya akuntabilitas yang muncul akibat hubungan yang telah terjalin antara principal dan agent. Pengukuran kinerja penting untuk menilai akuntabilitas. Selain itu, agent harus mengutamakan kepentingan principal yaitu kesejahteraannya. Pengukuran kinerja diperlukan karena munculnya akuntabilitas akibat hubungan tersebut. Kinerja yang diukur tersebut merupakan gambaran pencapaian yang diperoleh pemerintah daerah sebagai agent untuk mewujudkan kepentingan masyarakat (principal) yaitu kesejahteraannya. Keberhasilan agent dalam mewujudkan kesejahteraan principal dalam penelitian ini diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas PAD.

2.2 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola PAD serta mendapatkannya. Pemerintah melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehingga sistem pemerintahan dapat berjalan. Pemerintah juga melakukan hal tersebut untuk mendukung kegiatan pelayanan masyarakat serta pembangunan daerahnya. Semua hal tersebut dilakukan tanpa terlalu mengandalkan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah menjadi lebih luasa dalam menggunakan keuangannya untuk kepentingan masyarakat. Keleluasaan tersebut masih dilakukan dalam batas undang-undang (Syamsi, 1986).

2.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

RKKD ini memberikan gambaran seberapa tergantungnya pemerintah daerah terhadap dana dari luar. RKKD yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tidak terlalu mengandalkan dana dari luar. RKKD juga dapat menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat yang dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat adalah dalam hal membayar pajak dan retribusi (Halim, 2012).

2.2.2 Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD memberikan gambaran seberapa mampu suatu daerah dalam mencapai target anggaran PAD. Rasio ini menunjukkan kemampuan daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016).

2.3 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan saat manusia mampu memenuhi untuk memenuhi kebutuhan material, mendapatkan kehormatan, dan mencapai kebebasan memilih (Todaro, 2010). Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia ditujukan bagi penduduk agar memiliki pilihan yang luas melalui pemberdayaan masyarakat (UNDP, 1990).

Kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan saat kebutuhan seperti kelayakan rumah, biaya pendidikan yang murah dan kualitas kesehatan dapat terpenuhi. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga merupakan suatu kondisi pemaksimalan utilitas dengan keterbatasan anggaran dan tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani (Dura, 2016).

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah daerah (*agent*) diharapkan mampu mengelola keuangan daerah melalui APBD secara bertanggungjawab kepada masyarakat sehingga uang publik yang dikelola dapat bermanfaat bagi masyarakat (*principal*). Pemerintah daerah perlu menggali PAD dengan baik. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga sistem pemerintah dapat berjalan sistem pemerintahan. Pemerintah juga melakukan hal tersebut untuk mendukung kegiatan pelayanan masyarakat serta pembangunan daerahnya. Semua hal tersebut dilakukan tanpa terlalu mengandalkan pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah menjadi lebih luasa dalam menggunakan keuangannya untuk kepentingan masyarakat

Kemampuan daerah dalam menggali PAD agar tidak sepenuhnya bergantung kepada pemerintah pusat dapat diukur menggunakan RKKD. Semakin tinggi RKKD maka semakin tinggi juga PAD yang berarti pemerintah mampu untuk menggali sumber keuangan asli daerahnya untuk mendukung berjalannya pemerintahan untuk mencapai tujuannya melalui APBD yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PAD yang tinggi atau RKKD yang tinggi menunjukkan tingginya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. RKKD yang tinggi juga menunjukkan ketergantungan terhadap bantuan dari luar yang rendah. Semakin rendah ketergantungan terhadap bantuan dari luar maka makin banyak dana yang bisa digunakan untuk melaksanakan program-program yang telah dianggarkan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Penelitian terdahulu Cahyaning & Putri (2022); Khairudin et al., (2020) menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

H₁: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

2.4.2 Pengaruh Rasio Efektivitas PAD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

APBD dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat karena dalam APBD terdapat rencana-rencana pemerintah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Masyarakat sebagai principal memberikan tanggungjawab kepada pemerintah daerah melalui pemilihan umum. APBD diperlukan untuk memberikan manfaat kepada pemilih yang merefleksikan bentuk kebijakan publik dan program yang dibuat oleh politisi dengan mentranslasikan mandat yang diberikan masyarakat sebagai pemilih.

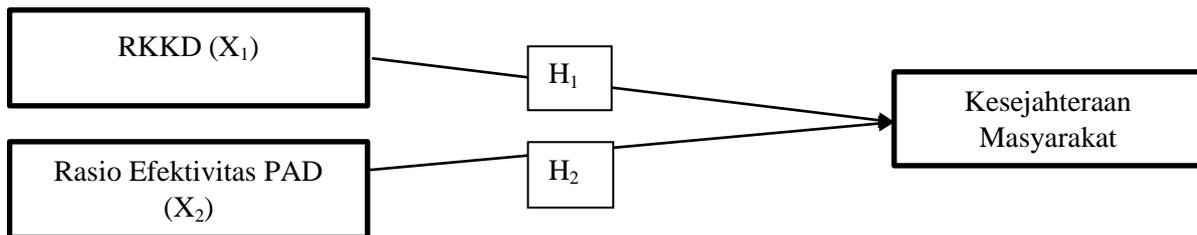
Pemerintah yang diberikan mandat oleh masyarakat melalui pemilihan umum memberikan pertanggungjawaban kepada pemilih. Pertanggungjawaban pemerintah dapat diukur menggunakan rasio efektivitas. Selain itu, pemerintah daerah memerlukan dana untuk melaksanakan APBD sehingga kemampuan untuk menggali PAD sesuai dengan target yang telah ditentukan penting untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dapat diukur dengan rasio efektivitas PAD.

Semakin tinggi rasio efektivitas PAD maka kemampuan daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD semakin baik. Kemampuan perealisasi PAD yang baik dapat membantu pelaksanaan APBD agar program-program yang telah direncanakan dapat dijalankan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat

Penelitian terdahulu Cahyaning & Putri (2022); Hamimah & Zulkarnain (2020); Khairudin et al., (2020) menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

H₂: Rasio Efektivitas PAD berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat

2.5 Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

3. Metodologi Penelitian

3.1 Definisi Operasional

3.1.1 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dalam menggali sumber keuangannya yaitu PAD untuk membiayai pelaksanaan APBD sehingga pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada halangan dana yang tidak tercukupi pada tahun 2020 dan 2021. Kinerja keuangan daerah diukur dengan rasio di bawah ini.

3.1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

RKKD ini menggambarkan ketergantungan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah terhadap sumber dana luar pada tahun 2020 dan 2021. Semakin tinggi RKKD maka tingkat ketergantungan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah terhadap sumber dana dari luar semakin rendah.

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Daerah} \times 100\%$$

3.1.3 Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD memberikan gambaran tentang kemampuan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai target PAD pada tahun 2020 dan 2021. Semakin tinggi rasio ini maka kemampuan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai target PAD pada tahun 2020 dan 2021 semakin tinggi.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

3.2 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan saat masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah mampu memenuhi kebutuhannya seperti kelayakan rumah, biaya pendidikan yang murah dan kualitas kesehatan.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan sampel dalam penelitian ini.

3.4 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data diperoleh masing-masing melalui website DJPK dan BPS. Data yang diambil adalah IPM dan Realisasi APBD dari tahun 2020-2021. Data tersebut berjenis kuantitatif.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasi data Realisasi APBD dan IPM di setiap kabupaten/kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2020-2021. Realisasi APBD diambil dari website DJPK dengan alamat "<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>". IPM diambil dari website BPS Kalimantan Tengah dengan alamat "<https://kalteng.bps.go.id/indicator/26/42/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia.html>".

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan SPSS untuk melakukan regresi linier berganda terhadap data yang akan dianalisis. Analisis rasio dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan regresi linier berganda. Tahapan analisis untuk melakukan regresi adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji determinasi, uji f, dan uji t. Model persamaan linier berganda sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y adalah Kesejahteraan Masyarakat

X₁ adalah Kemandirian Keuangan Daerah

X₂ adalah Efektivitas PAD

α adalah Konstanta

β adalah Koefisien Regresi

4. Hasil

4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Kesejahteraan Masyarakat	70.6950	3.23328	28
Kemandirian Keuangan Daerah	9.8846	5.11451	28
Efektivitas PAD	108.1796	47.89796	28

Tabel 2 menunjukkan bahwa mean variabel kesejahteraan masyarakat sebesar 70.69% dengan standar deviasi 3.23%. Kesejahteraan masyarakat berkategori tinggi dengan angka rata-rata 70.69%.

Mean variabel kemandirian keuangan daerah adalah 9.88% dengan standar deviasi 5.11%. Kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan kemandirian yang rendah sekali dengan angka rata-rata 8.33%.

Mean variabel efektivitas PAD adalah 108.18% dengan standar deviasi 47.90%. Kinerja di kabupaten/kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah dalam merealisasikan PAD sangat efektif berdasarkan angka rata-rata 108.18%.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			28
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.24480246
Most Extreme Differences	Absolute		.147
	Positive		.147
	Negative		-.081
Test Statistic			.147
Asymp. Sig. (2-tailed)			.127 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.539 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.526
		Upper Bound	.552

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai sig 0.539 > 0.05. Hal ini memenuhi syarat agar data dapat dikatakan normal.

4.2.2 Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.720 ^a	.518	.479	2.33287	.939

a. Predictors: (Constant), Efektivitas PAD, Kemandirian Keuangan Daerah
 b. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 4 menunjukkan $1.5596 (dU) > 0.939 (\text{durbin-watson}) < 2.4404 (4 - dU)$. Hal ini memenuhi kriteria agar tidak terdapat autokorelasi antar variabel.

4.2.3 Uji Multikolinieritas

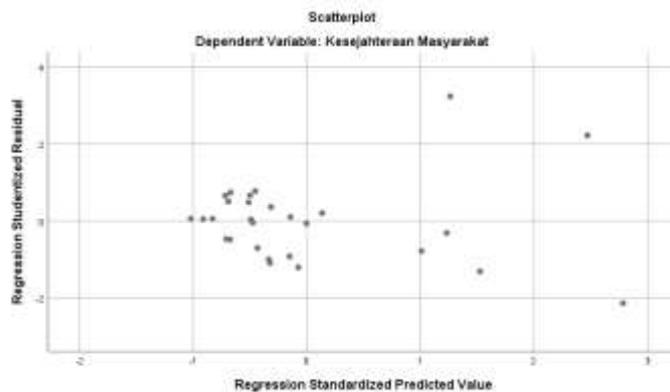
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kemandirian Keuangan Daerah	.827	1.209
Efektivitas PAD	.827	1.209

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil VIF di antara 1 – 10, yaitu kemandirian keuangan daerah 1.209 dan efektivitas PAD 1.209. Hal ini menjelaskan tidak terdapat multikolinieritas.

4.2.4 Uji Heterokedasitas



Gambar 2. Hasil Uji Heterokedasitas

Hasil uji heterokedasitas menunjukkan titik-titik data menyebar dan tidak membentuk pola. Hal ini memenuhi kriteria regresi yang tidak terjadi heterokedasitas.

4.3 Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan tabel di bawah, diperoleh persamaan analisis regresi berganda sebagai berikut.

$$Y = 66.813 + 0.481X_1 + (-)0.008X_2$$

Persamaan di atas menggambarkan bahwa variabel bebas (independent) X_1 dan X_2 memengaruhi Y . X_1 adalah kemandirian keuangan daerah, X_2 adalah efektivitas PAD, dan Y adalah kesejahteraan masyarakat Interpretasi dari persamaan ini adalah sebagai berikut.

- a. Jika X_1 dan X_2 sama dengan nol maka kesejahteraan masyarakat nilainya adalah 66.813 satuan
- b. Jika X_1 meningkat sebesar 1 sedangkan variabel lain tetap maka kesejahteraan masyarakat meningkat sebesar 0.481
- c. Jika X_2 meningkat 1 sedangkan variabel lain tetap maka kesejahteraan masyarakat meningkat sebesar -0.008

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	66.813	1.210			55.234	.000		
Kemandirian Keuangan Daerah	.481	.097	.761		4.986	.000	.827	1.209
Efektivitas PAD	-.008	.010	-.120		-.785	.440	.827	1.209

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

4.4 Uji Determinasi

Tabel 7. Hasil Uji Determinasi

Model	Model Summary ^b		
	R	R Square	Adjusted R Square
1	.720 ^a	.518	.479

a. Predictors: (Constant), Efektivitas PAD, Kemandirian Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 7 menunjukkan R Square sebesar 0.518 yang mengindikasikan kesejahteraan masyarakat bisa diterangkan oleh variabel kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD sebesar 51.8% sedangkan sisanya dapat diterangkan dengan variabel yang lain.

4.5 Uji F

Tabel 8. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	146.204	2	73.102	13.432	.000 ^b
	Residual	136.057	25	5.442		
	Total	282.261	27			

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

b. Predictors: (Constant), Efektivitas PAD, Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 8 menunjukkan nilai sig $0.000 < 0.05$ yang berarti kemandirian keuangan daerah dan efektivitas PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

4.6 Uji t

Tabel 9. Hasil Uji t

Coefficients ^a		
Model	T	Sig.
1 (Constant)	55.234	.000
Kemandirian Keuangan Daerah	4.986	.000
Efektivitas PAD	-.785	.440

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 9 menunjukkan nilai sig variabel kemandirian keuangan daerah lebih kecil dari 0.05 yaitu sebesar 0.000 yang berarti kemandirian keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat. Nilai sig variabel efektivitas PAD lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar "0.440". hal ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

5. Diskusi

5.1 Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan secara parsial (uji t), signifikansi rasio kemandirian keuangan daerah $0.000 < \text{sig alpha } (\alpha) 0.05$ yang berarti "rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap IPM yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat dikatakan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat". Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Cahyaning & Putri (2022); Karimah et al., (2020); Khairudin et al., (2020).

Keberpengaruh tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkat rasio kemandirian keuangan daerah maka semakin baik kemampuan daerah dalam menggali sumber asli keuangan daerah tanpa tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat sehingga hal yang telah diprogramkan untuk masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang dianggarkan. Walaupun rasio kemandirian keuangan daerah pada penelitian ini rendah tapi rasio kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan mandat yang telah diberikan masyarakat membuat program-program yang direfleksikan dalam anggaran. Dana diperlukan untuk melaksanakannya sehingga kemampuan menggali sumber asli keuangan daerah yang baik tanpa terlalu bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan pemerintah untuk menggali dan mengelola PAD tanpa terlalu mengandalkan dana transfer dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah yang semakin mandiri atau tidak terlalu mengandalkan pemerintah pusat akan lebih memiliki dana untuk melakukan pembangunan yang dapat diakses masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan hasil kerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola dalam APBD oleh pemerintah daerah. APBD penting peranannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBD mencerminkan kebijakan publik dan program-program yang dibuat oleh politisi yang telah dipilih oleh masyarakat untuk memberikan manfaat kepada pemilihnya.

Penelitian ini mengikuti teori keagenan bahwa agen bertanggungjawab untuk memaksimalkan keuntungan prinsipal. Pemerintah daerah yang telah dipilih (agen) oleh masyarakat (prinsipal) harus memaksimalkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Pertanggungjawaban yang dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah merupakan kinerja atau prestasi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

5.2 Pengaruh Rasio Efektivitas PAD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan secara parsial (uji t), signifikansi rasio efektivitas PAD $0.440 > \text{sig alpha } (\alpha) 0.05$ yang berarti “rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh IPM yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat dikatakan rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat”. Hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian Cahyaning & Putri (2022); Hamimah & Zulkarnain (2020); Khairudin et al., (2020).

Ketidakterpengaruhannya tersebut disebabkan karena PAD belum cukup untuk menutupi pos belanja operasi dan belanja modal. PAD sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer sehingga tidak mungkin untuk menutupinya. Selain itu, jumlah belanja operasi dan belanja modal lebih besar dari PAD walaupun secara rata-rata pemerintah daerah melampaui target PAD yaitu 108.18%.

Pemerintah daerah membuat program-program yang bermanfaat bagi masyarakat yang dituangkan dalam APBD sehingga kesejahteraan dapat meningkat namun pada penelitian ini rata-rata rasio efektivitas PAD melampaui target PAD belum bisa untuk menutupi pengeluaran yang diperlukan untuk pelayanan publik. Efektivitas PAD yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah melaksanakan tanggungjawab yang diberikan masyarakat sangat baik namun tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat masih tinggi.

Rasio efektivitas PAD menunjukkan hasil kerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Penelitian ini didasarkan pada hasil kerja pemerintah daerah yang baik dalam melaksanakan APBD sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui keputusan politisi dalam APBD. Namun dalam penelitian ini, hasil kerja yang baik masih belum cukup untuk mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Teori keagenan menjelaskan bahwa akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi hubungan agen (pemerintah daerah) dan prinsipal (masyarakat). Selain itu pemerintah daerah juga harus memaksimalkan kesejahteraan masyarakat sebagai prinsipal. Pemerintah daerah dalam memaksimalkan kesejahteraan masyarakat menggali keuangan asli daerahnya namun hanya dari itu saja masih belum cukup untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti dari hasil penelitian ini.

Peranan pemerintah pusat untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat pada tingkat daerah sangat besar. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapatan transfer yang jauh lebih besar dibandingkan PAD. Sebagian besar dana yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat berasal dari pendapatan transfer. Hal ini sejalan dengan penelitian Hamimah & Zulkarnain (2020) bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat meskipun rasio efektivitas PAD tidak mengalami perubahan karena sebagian besar dana berasal dari pendapatan transfer.

6. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020-2021
2. Rasio Efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2021

Referensi

- Astuti, S., & Mispriyanti. (2019). *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Studi Kasus Kabupaten Yang Ada di Provinsi Jawa Tengah*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur 2021*.
- Bergman, M., & Lane, J.-E. (1990). Public Policy in a Principal-Agent Framework. *Journal of Theoretical Politics*, 2(3).
- Cahyaning, E., & Putri, F. K. (2022). Pengaruh Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(4). <https://doi.org/10.55587/jla.v2i4.85>

- Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa , Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 10, 26–32.
- Evlyn, M., & Rahayu, Y. (2018). *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hamimah, H., & Zulkarnain, Z. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Riset Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 1.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kalteng.co. (2022, April 17). *Palangka Raya Raih Nilai Tertinggi IPM di Kalimantan*. Kalteng.Co.
- Karimah, N. N., Sarwani, & Adriani, A. (2020). Analysis of Regional Government Financial Performance and Impact on Welfare Society. *AKUNTABEL*.
- Khairudin, Aminah, & Redaputri, A. P. (2020). Pentingnya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *AKUNTABEL*, 17(1), 148–151. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru* (Mardiasmo, Ed.). CV. ANDI OFFSET.
- Syamsi, I. (1986). *Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. Rajawali.
- Todaro, M. P. (2010). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed.). Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1990). *Human Development Report 1990*.
- Zakni, M. H. (2020, December). *Pelayanan Publik dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*. OMBUDSMAN. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pelayanan-publik-dalam-rangka-mewujudkan-kesejahteraan-masyarakat>